

## PROXY WAR DAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA: VICTORIA CONCORDIA CRESCIT

### PROXY WAR AND INDONESIA'S NATIONAL SECURITY: VICTORY GROWS THROUGH HARMONY

Safril Hidayat<sup>1</sup> dan Wawan Gunawan<sup>2</sup>

Kostrad dan Universitas Jendral Achmad Yani  
(safrilhidayatzeni1995@yahoo.co.id dan wagoenbray@yahoo.com)

**Abstrak** – Perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka *struggle for power* dan *power of influence* mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam mencapai tujuannya. Indonesia dalam menghadapi strategi proxy war menjaga keamanan nasionalnya dari upaya disintegrasi dapat dihilangkan sehingga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Dalam menjaga integrasi bangsa tersebut maka Indonesia perlu melakukan kontra proxy. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan proxy war. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kontra proxy war dilakukan dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan *Opus Dei* atas Indonesia, melakukan kebijakan yang tidak materialistik dan untuk kepentingan orang banyak (*pro bono*), dan menjaga keharmonisan Indonesia.

**Kata Kunci** : proxy war, motif perang proksi, keamanan nasional, kontra proxy war.

**Abstract** – Proxy war has been going on since ancient times until now carried out by the major powers by using state actors or non-state actors. National interests of major countries in the framework of struggle for power and power of influence affecting international relations. Proxy war has motives and approaches of hard power and soft power to achieve its goals. Indonesia in the face of proxy war strategy in order to maintain its national security efforts so that the disintegration can be eliminated and integration of the Unitary Republic of Indonesia remain intact. In keeping with the integration of the nation, so Indonesia needs to do the counter proxy. This article uses a qualitative approach to the data source of reference and literature related to the proxy war. Validity and reliability of data was done by triangulation reference. The results showed that the counter proxy war can be conducted through maintaining unity in diversity which is *Opus Dei* on Indonesia, pursue policies that are not materialistic, and for the public good (*pro bono*), and maintain the harmony of Indonesia.

**Keywords:** proxy war, motives of proxy war, national security, counter proxy war.

<sup>1</sup> Penulis adalah Letnan Kolonel Czi Dr. Safril Hidayat, psc, Msc, Pamen Kostrad. Lulusan Akademi Militer 1995.

<sup>2</sup> Penulis Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung. Penulis aktif di Harian Pikiran Rakyat Bandung.

## Pendahuluan

**P**erang atau konflik yang terjadi sebagai *proxy war* telah berlangsung sejak zaman dahulu.

Pada masa sebelum Perang Dunia I dan Perang Dunia II secara total lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan *Proxy War* yang terjadi dimasa Perang Dingin (*Cold War*) dan sebagian dari *proxy war* tersebut tertulis dalam buku sejarah dan politik, seperti terangkum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Berpijak pada tabel 1 di atas terkaji bahwa terdapat dua aktor penting pelaku perang *proxy*. *Proxy war* yang dilakukan oleh suatu negara besar kepada sekelompok individu yang bukan merupakan aktor negara (*non state actors*) dan aktor negara (*state actors*). Semua konflik, insurjensi, perang, dan perang sipil tersebut memiliki tendensi kepada kekuasaan (*power*).

Dalam menggapai kekuasaan digunakan politik sebagai salah satu

**Tabel 1.** Proxy War sebelum Perang Dunia I sampai dengan Perang Dingin

Perang Dunia I	Perang Dunia II	Perang Dingin	Proxy War yang telah dan sedang berlangsung ( <i>ongoing</i> )
7 Peristiwa	5 Peristiwa	72 Peristiwa	28 Peristiwa
Perang Mesir dengan Dinasti Ottoman, Perang Sipil di Uruguay, Perang di Sudan (Mahdist), Perang Sipil I dan II di Samoa, krisis di Venezuela 1902-1903, Kampanye di Somalia.	Perang Sipil di Finlandia, Revolusi dan Intervensi di Hongaria, Perang Kemerdekaan Turki, Perang Sipil Cina, Perang Sipil Spanyol,	Perang Sipil Cina, Perang Sipil Yunani, Perang Vietnam, Krisis Iran tahun 1946, Perang IndoCina I, Perang Sipil Paraguay, Perang di Semenanjung Maaysia, Konflik Internal Myanmar, Konflik Balochistan, Perang Korea, Bangkitnya Mau-mau, Revolusi Kuba, Perang IndoCina II, Krisis Selat Taiwan I, Perang Algeria, Perang Sipil Sudan I, Krisis Terusan Suez, Krisis Selat Taiwan II, Krisis Lebanon 1958, Kebangkitan Tibet 1959, Krisis Amerika Tengah, Krisis Kongo, Perang Kolonial Portugis, Konflik Xinjiang, Perang Irak dengan Kurdi I, Perang Kemerdekaan Eritrea, Perang Sipil Yaman Utara, Pemberontakan Dhofar, Insurjen Komunis Sarawak, Perang Pasir di Algeria, Darurat Aden,	Insurjen Mao, Perang Sipil Angola, Okupasi Indonesia atas Timor Leste, Perang Cabinda, Konflik Chittagong Bangladesh, Perang Sipil Mozambik, Konflik Nagorno-Karabakh, Perang Sipil Afganistan, Insurjensi di Jammu dan Kashmir, Konflik Georgia-Osetia, Konflik Georgia-Abkhaz, Perang Sipil Georgia, Perang Yugoslavia, Perang Sipil Tajikistan, Insurjensi Afar II, Insurjensi ADF di Uganda, Perang Kongo I, Perang Sipil Nepal, Perang Sipil Guinea Bissau, Perang Sipil Ivoria I, Perang Darfur, Insurjensi PPA di Uruguay, Insurjensi Irak, Krisis Yaman, Perang Sipil Suriah, Perang Sipil Suriah di Lebanon, Krisis Ukraina, Perang Sipil Libya II,

		<p>Insurgensi di Timur Laut India, Perang di Rhodesia, Perang Sipil di Dominika, Perang Sipil di Chadia, Insurgensi Komunis di Thailand, Kampanye Bolivia, Perang Korea II, Perang di Perbatasan Afrika Selatan, Perang Sipil Nigeria, Perang Insurjen Mao, insurjen Komunis di Malaysia, Insiden teroris, Operasi Condor, Perang A Wadiah, Konflik Sipil di Filipina, Perang Yaman 1972, Perang Sipil Angola, Perang Sipil Ethiopia, Perang Sipil Lebanon, Perang Sahara Barat, Okupasi Indonesia di Timor Leste, Perang Cabinda di Angola, Insurgensi di Laos, Konflik Sipil di Turki, Shaba I di Angola, Perang Ogaden di Ethiopia, Perang Vietnam dengan Kamboja, Perang Sipil Mozambik, Konflik Chittagong di Bangladesh, Shaba II di Kongo, Perang Uganda dengan Tanzania, Pemberontakan NDF di Yaman, Konflik Chadia dengan Libya, Perang Yaman 1979, Perang Uni Soviet dan Afghanistan, Perang Cina dengan Vietnam, Konflik Internal Peru, Perang Perbatasan Ethiopia-Somalia, Perang Sipil Srilangka, Perang Perbatasan Thailand-Laos, Perang Sipil Afganistan.</p>	
--	--	--	--

Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_proxy\\_wars](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_proxy_wars) , diakses tanggal 23 Januari 2017, (Diolah Penulis)

pendekatan yang ketika melewati batas teritorial negara maka dengan politik luar negeri dan ketika menjadi dinamika internasional disebut sebagai politik internasional. Dengan demikian politik yang dilakukan oleh negara-negara besar erat kaitannya dengan *power* sebagaimana adagium *all politics tend to power*. Politik luar negeri suatu negara dilakukan dengan kebijakan luar negeri sebagai sebuah aksi yang merupakan suatu bentuk tingkah laku (*...as a form of behavior...*).<sup>3</sup>

Tingkah laku tersebut dilakukan dengan pendekatan atau aksi negara-negara besar dalam bentuk *soft power* atau *hard power*. *Soft power* yang dilakukan dalam *proxy war* adalah menggunakan perangkat ekonomi (*Economy Power*) dan dewasa ini adalah perangkat teknologi dan informasi dalam bentuk bantuan (*aid*) atau donasi dari negara atau lembaga donor (yang juga didukung oleh negara donor) kepada negara-negara yang membutuhkannya yang umumnya merupakan negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Sedangkan *hard power* dilakukan dengan intervensi oleh negara-negara yang relatif mapan secara ekonomi, politik, dan militer kepada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Intervensi tersebut dilakukan dengan perangkat militer (*military power*) atau perangkat politik (*political power*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Margaret G. Hermann, "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders", *International Studies Quarterly*, Vol. 24, No. 1, 1980, hlm. 7-46.

<sup>4</sup> Mike Stillman, *Proxy Wars: The Business of War*,

Seperangkat aturan dan standar pencapaian juga digelontorkan untuk mengukur kemajuan yang dicapai oleh negara-negara penerima donor dalam bentuk kebijakan global berupa MDG (*Millenium Development Goals*), *Civil Society*, *Civil Supremacy*, *Human Rights*, *Climate Change*, *Transparency*, *Accountability*, dan lain sebagainya. Seperangkat standarisasi dan regulasi ini tidak dapat ditolak karena merupakan isu penting dalam politik internasional. Bahkan dewasa ini isu yang selama perang dingin merupakan isu *low politics* (ekonomi, teknologi, dan sebagainya) sama pentingnya dengan isu *high politics* (militer dan politik).

Fenomena-fenomena tersebut di atas tidak dapat dihindari oleh negara-negara yang membutuhkan pembangunan didalam negaranya (*domestic politics*). Hakikat negara dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan Socrates ratusan tahun lalu merupakan wujud politik domestik. Keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara menjadikan kerjasama sebagai kata kunci untuk melakukan tugas dan fungsi negara. Bila tidak dapat dipenuhi maka besar kemungkinan akan terjadi konflik atau perang demi tersedianya sumber daya dalam rangka memenuhi rasa aman dan kesejahteraan rakyatnya.

Penggunaan *hard power* di zaman ini kemungkinan akan menerima penolakan dari berbagai negara. Penolakan tersebut semakin besar bila negara tersebut tidak

---

(Bloomington, Indiana: Trafford on Demand Pub, 2008), hlm. 78.

memiliki imej nasional yang baik (*national image*) dalam politik internasional seperti yang dialami Cina dan Rusia. Bila *hard power* dilakukan oleh negara yang memiliki dominansi, hegemoni, dan imej nasional yang ‘baik’ maka ada kemungkinan tindakan *hard power* dilegitimasi internasional (*law warfare*) seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, NATO, dan sebagainya.

Dalam perspektif Indonesia, isu mengenai *proxy war* ini semakin besar setelah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan sosialisasi ke berbagai pendidikan tinggi, organisasi masyarakat dan pemuda serta berbagai kalangan di Indonesia mengenai ancaman *proxy war*. *Proxy War* dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian perang perpanjangan tangan. Perang yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri atau aktor lain yang beroperasi tentu saja dengan memanfaatkan masyarakat lokal atau setempat. Namun demikian definisi tentang *proxy war* belum dapat diastikan dalam perspektif Indonesia khususnya perspektif militer tentang *proxy war*. Definisi *proxy war* yang dikeluarkan oleh [www.reference.com](http://www.reference.com) (2017) sebagai berikut:

*“A proxy war is a conflict inflicted by a major power or powers that do not become involved in it directly. Often, proxy wars involve countries fighting their opponents’ allies or helping their allies fight their opponents.”*<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Proxy War Reference, <https://www.reference.com/education/proxy-war-b728308de84469fd>, diakses pada 12 Februari 2014.

Kamus Oxford online (2017) memiliki pengertian tentang *proxy war* yang kurang lebih sama dimana dinyatakan bahwa tidak terlibat langsung yaitu *“A war instigated by a major power which does not itself become involved.”*<sup>6</sup> Sungguh menarik bila melihat adanya kata *major power* (kekuatan besar) dibalik *proxy war*.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa motif *major power* atau *major powers* di Indonesia? Kemudian manakah yang lebih berbahaya *hard power* atau *soft power* dalam konteks Indonesia? Bagaimana perjalanan sejarah *proxy war* yang terjadi di Indonesia? Bagaimana membawa kemajemukan Indonesia yang rentan terhadap upaya *proxy war*? Melalui artikel singkat ini penulis akan menguraikan mengenai motif dalam *proxy war*, penggunaan *soft power* dan *hard power*, keamanan nasional, kontra *proxy*, serta integrasi dan disintegrasi.

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan studi literatur dan dokumentasi sebagai sumber data penelitian. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi.

## Kerangka Pemikiran

### Motif Proxy War

Pada masa perang dingin yang penuh dengan nuansa *statism*, *self help*, dan *survival* maka masing-masing negara

<sup>6</sup> English Oxford Living Dictionaries, Proxy war, [https://en.oxforddictionaries.com/definition/proxy\\_war](https://en.oxforddictionaries.com/definition/proxy_war), diakses pada 12 Februari 2014.



mementingkan isu keamanan (*security*).<sup>7</sup> Kepentingan keamanan sekaligus juga kepentingan politik sehingga *proxy* yang dilakukan berkaitan dengan dua isu tersebut (*high politics*). Pasca perang dingin dimana isu perang nuklir tidak lagi menjadi isu utama maka isu ekonomi, teknologi, hak azasi manusia (lebih tepat lagi dalam perspektif ilmu hubungan internasional adalah *human security*), dan isu lingkungan. Bahkan dewasa ini, *struggle for power and the power of influence* berlangsung di luar isu keamanan dan politik walaupun pada akhirnya tetap menyentuh kepentingan keamanan dan politik internasional maupun politik domestik suatu negara.<sup>8</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa *all politics tend to power*. Maka, pada hakikatnya segala bentuk *proxy* yang dilakukan oleh kekuatan besar pada suatu negara baik melalui elit politik maupun *Non Governmental Official* (NGO) adalah dalam rangka *struggle for power* ataupun *power of influence*.<sup>9</sup>

Motif ini belum tentu ingin menduduki, karena akan berhadapan dengan lembaga internasional dan

negara-negara lainnya. Namun demikian dalam beberapa kasus intervensi dilakukan untuk mengganti rezim yang berkuasa (seperti halnya *Arab Spring*), mempengaruhi pemimpin politik (Amerika Latin dan Afrika), dan tentunya pada akhirnya melanggengkan kekuasaan negara-negara besar di panggung politik internasional baik dalam kerangka kekuasaan (*power*) maupun pengaruh (*influence*).

### **Hard Power dan Soft Power**

Ide tentang perbedaan *hard power* dengan *soft power* diperkenalkan oleh Joseph Nye lebih dari dua dekade yang lalu (1990). Nye mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan<sup>10</sup> dan *hard power* sebagai penggunaan kekuatan koersif melalui bujukan atau ancaman<sup>11</sup>. *Hard power* didasarkan pada koersif melalui intervensi militer, diplomasi dan sanksi ekonomi<sup>12</sup> dan bergantung pada sumber daya yang nyata seperti angkatan bersenjata atau kekuatan ekonomi.<sup>13</sup> Contoh penggunaan *hard power* adalah invasi Jerman ke Polandia (1939), dan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak (1991) pasca Perang Teluk I.

<sup>10</sup> Joseph S. Nye, *Understanding International Conflicts*. 7th ed, (New York: Pearson, 2009), hlm. 61.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>12</sup> E.J. Wilson, "Hard Power, Soft Power, Smart Power", *ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences*, Issue 616, 2008, hlm. 114.

<sup>13</sup> G. Gallarotti, "Soft Power: what it is, its importance, and the conditions for its effective use", *Journal of Political Power*, vol. 4, No.1, 2011, hlm. 29.

<sup>7</sup> Tim Dunne & Brian C. Schimdt, "Realism", dalam John Baylis & Steve Smith (Eds), *The Globalization of World Politics*, 2<sup>nd</sup> edition, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 141-60.

<sup>8</sup> Dick Simpson, James Nowlan, Elizabeth O'Shaughnessy, *The Struggle for Power and Influence in Cities and States 1st Edition*, (London: Pearson, 2010), hlm. 233. Bruce Bueno de Mesquita and Alastair Smith, *Domestic Explanations of International Relations*, (New York: Department of Politics New York University, 2012), hlm.161-81.

<sup>9</sup> Michael A. Innes, *Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates & the Use of Force*, (Dulles Virginia: Potomac Books, 2012) dan Mike Stillman, *Proxy Wars: The Business of War*. Bloomington, (Indiana: Trafford on Demand Pub, 2008).

*Soft power* adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan.<sup>14</sup> Nye menyatakan bujukan sebagai kekuatan persuasif berdasarkan daya tarik dan emulasi dari sumber daya budaya, ideologi, dan lembaga.<sup>15</sup> Dispersi budaya Amerika dalam Blok Timur selama Perang Dingin menunjukkan adanya *soft power* Amerika, dan proses perluasan Uni Eropa merupakan contoh *soft power*.<sup>16</sup>

Efektivitas pendekatan *hard power* dan *soft power* tergantung pada aksesibilitas sumber daya.<sup>17</sup> Negara-negara besar (*major powers*) seperti Amerika Serikat atau Rusia dengan pendapatan nasional yang lebih tinggi mampu secara finansial untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang besar, dan menempatkan negara-negara lain secara ekonomi berada di bawah tekanan. Negara-negara yang lebih kecil, dengan minimnya kemampuan *hard power*, namun memiliki kekuatan *soft power* dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi negara lain seperti halnya Norwegia.<sup>18</sup>

Namun demikian terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan Jepang ataupun Cina. Heng menyatakan bahwa sejarah perang Jepang membentuk keterbatasan dalam *soft power*.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> E.J. Wilson, *op.cit*, hlm.114.

<sup>15</sup> Joseph Nye, *op.cit*, hlm..63

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 63-64.

<sup>17</sup> A. Heywood, *Global Politics*, (Basingstoke: Palgrave Foundation, 2011), Gambar. 9.1, hlm. 72.

<sup>18</sup> Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means To Success In World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004), hlm.111-112.

<sup>19</sup> Y.K. Heng, "Mirror, mirror on the wall, who is

Kepemimpinan otoriter Cina menghambat pemanfaatan penuh potensi *soft power*-nya.<sup>20</sup> Dengan demikian kekuatan *soft power* suatu negara berhubungan dengan sejarah dan sistem sosial untuk menentukan efektivitas *soft power*-nya.

Smith-Windsor berpendapat bahwa batas antara *soft power* dan *hard power* itu tidak jelas.<sup>21</sup> Smith-Windsor menyatakan bahwa angkatan bersenjata dapat juga digunakan dalam operasi penjaga perdamaian, kemanusiaan, dan penyerahan kekuasaan (*interposisi*).<sup>22</sup> Penggunaan angkatan bersenjata seperti tersebut menunjukkan tidak adanya batas tegas antara *hard power* dan *soft power*.

Strategi kebijakan luar negeri suatu negara dapat berupa kombinasi yang efektif dari dua jenis *power* tersebut. Hal ini kemudian disebut oleh Nossel dan Nye sebagai "*smart power*".<sup>23</sup> Armitage dan Nye menyatakan *smart power* sebagai kombinasi *hard power* dan *soft power*.<sup>24</sup> Armitage dan Nye sepakat menyatakan bahwa *smart power* adalah pendekatan yang menggarisbawahi perlunya militer yang kuat, tetapi juga berinvestasi besar dalam aliansi, kemitraan, dan lembaga. Menurut Wilson *smart power* adalah

---

the softest of them all? Evaluating Japanese and Chinese strategies in the 'soft' power competitions era", *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol.10, 2010, hlm. 299.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.300.

<sup>21</sup> B.A. Smith-Windsor, "Hard Power, Soft Power reconsidered", *Canadian Military Journal*, Vol. 1, No.3, 2000, hlm. 51-56.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>23</sup> Nye, *op.cit*, dan S. Nossel, "Smart Power", *Foreign Affairs*, Vol. 83, No.2, 2004, hlm. 131-142.

<sup>24</sup> R. L. Armitage & Joseph S. Nye, *CSIS Commission on Smart Power: A smarter, more secure America*. (Washington: CSIS Press, 2007), hlm.7.

kemampuan (...) untuk menggabungkan unsur *hard power* dan *softpower* yang saling menguatkan.<sup>25</sup>

Pada penggunaan *hard power* kita tentu sudah mengetahui titik-titik lemahnya. Pasca Perang Dingin, penggunaan *soft power* semakin kuat dilakukan oleh negara-negara besar. Dengan demikian titik berat analisis adalah penggunaan *soft power* untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya. Cooper menyatakan setidaknya terdapat tiga titik lemah *soft power*. **Pertama**, mempertanyakan kekuatan budaya sebagai sumber *soft power* dimana pengaruh budaya dengan kekuasaan politik tidak sama; **Kedua**, hasil yang diinginkan dengan menggunakan strategi *soft power* tergantung pada keadaan tertentu yang tidak bisa selalu dipengaruhi oleh negara; **Ketiga**, Cooper mengkritisi manfaat yang sebenarnya dari pengaturan agenda sebagai hasil positif dari praktik-praktik yang telah berlangsung lama dengan menggunakan *soft power*.<sup>26</sup>

*Proxy war* cenderung dimulai dengan *soft power* mulai dari diplomasi, pemberian donasi, sampai dengan membina kelompok insurjensi (*dissident*) dalam suatu negara. Adagium *enemy's enemy is friend* kerap diimplementasikan dalam melakukan *soft power*. Pada skala tertentu ketika *soft power* tidak efektif lagi maka dilakukan *hard power* dalam

bentuk embargo, intervensi politik, dan intervensi militer melalui upaya-upaya penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal melalui organisasinya sejalan dengan keinginan yang telah ditularkan oleh negara-negara besar sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

### **Kontra Proxy War atau Counter Proxy War**

Semangat nasionalisme masing-masing negara di Eropa dan kemudian menjadi semangat regionalisme melahirkan Uni Eropa. Perluasan keanggotaan Uni Eropa menunjukkan keberhasilan penggunaan kekuatan *soft power* secara efektif.<sup>27</sup> Integrasi negara-negara lainnya menjadi anggota Uni Eropa menurut Cooper menunjukkan bagaimana *soft power* dengan kesiapannya untuk menawarkan pilihan di meja para pengambilan keputusan.<sup>28</sup> Terbentuknya Uni Eropa menjamin perdamaian dan keamanan antara negara-negara Eropa dan proses pembesaran Uni Eropa semakin memperkuat posisinya di tingkat global. Dengan demikian, *soft power* Uni Eropa ini bermanfaat bagi negara-negara anggotanya serta untuk Uni Eropa sendiri.

### **Keamanan Nasional**

Konsep keamanan nasional NKRI dengan jelas dan tegas tercatat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, pemerintah, dengan segenap potensi dan sumberdayanya wajib menjaga keamanan

<sup>25</sup> E.J. Wilson, *op.cit*, hlm. 115.

<sup>26</sup> R. Cooper, *Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy*, dalam D. Held & M. Koenig-Archibugi (Eds), *American Power in the 21st Century*, (Cambridge: Polity Press, 2004), hlm. 170-171.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 179-180.



nasional dengan cara: (a) Melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (c) Ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Amanat konstitusi terutama berada di pundak eksekutif guna menjalankan tugas pertahanan negara yang bermakna sebagai menegakan kedaulatan eksternal negara sebagai manifestasi dari ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan militer (*external sovereignty by force*). Selain itu pemerintah bertugas melaksanakan diplomasi dalam masyarakat dunia untuk menjaga *external sovereignty* terutama dalam upayanya mengembangkan *external sovereignty by diplomacy*. Sementara itu, ke dalam/internal (*internal sovereignty*), maka pemerintah (eksekutif) bertugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paham komunitarian (timbang balik antara individu dengan komunitasnya) yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, menunjukkan bahwa konsep bangsa adalah manusia-manusia warga negara Indonesia (*human*). Dengan demikian *people centered security* (*human security*) dalam konteks Indonesia tidak disebut sebagai keamanan individu atau keamanan insani semata tetapi hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keamanan warga negara sebagai bagian dari keamanan nasional.

Konsep Keamanan Insani merupakan jaminan bahwa negara akan melaksanakan kewajibannya melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, membebaskan warga negara dari rasa takut (*freedom from fear*) dan memberikan kebebasan untuk berkeinginan (*freedom of want*). Kebebasan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia tentu saja bukan kebebasan yang individualistik liberal, tetapi kebebasan komunitarian dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Artinya, ada keseimbangan antara keamanan negara dengan keamanan warga negara. Keamanan Warga Negara juga mengisyaratkan bahwa negara wajib melindungi semua warga negara Indonesia dimanapun berada termasuk di luar negeri (asas nasionalitas).<sup>29</sup>

Dalam kaitannya antara kemanan nasional dengan *proxy war* maka kebijakan pemerintah selayaknya dapat mengantisipasi terjadinya *determined to sow terror* yang dilahirkan oleh *proxy war* (teror yang ditaburkan melalui *proxy war*). Dalam banyak pemahaman, kebijakan keamanan nasional merupakan persepsi pemerintah terhadap ancaman yang disinyalir dapat mengganggu keamanan negara sekaligus warga negaranya dan penanggulangannya. Kebijakan dapat memandu tindakan yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah, sehingga kebijakan merupakan rencana aksi yang

<sup>29</sup> Sekjen Wantannas, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010), hlm. 53.

telah dipertimbangkan untuk memandu keputusan yang telah ditentukan. Kebijakan keamanan nasional, tentu akan mempertimbangkan ancaman internal maupun eksternal, dan tentu saja harus sejalan dengan kebijakan global yang telah diratifikasinya.<sup>30</sup>

Dalam negara demokratis, parlemen berwenang menentukan keputusan akhir atas anggaran dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan termasuk kebijakan keamanan<sup>31</sup>. Dalam membuat keputusan keamanan nasional, suatu pemerintah tidak hanya mengatur dirinya sendiri tetapi juga mengatur negara lain. Jika sebuah negara merasa terancam, ia bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengancam negara-negara lain (*balance of power*). Tindakan masing-masing negara berkaitan secara erat dengan masa depan dan nasib setiap kesatuan politik yang lain.<sup>32</sup>

Dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* keamanan merupakan “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”. Pengertian tradisional itu memiliki ciri: *pertama*, identifikasi “nasional” sebagai “negara”; *kedua*, ancaman berasal dari luar wilayah negara; dan, *ketiga*, penggunaan kekuatan militer

untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Oleh karena itu sangatlah masuk akal apabila Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan. Disamping itu, ancaman militer bukan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara. Barangkali definisi tradisional seperti yang puluhan tahun dikenal di Barat itu hanya dapat dimengerti terutama dengan mengingat sejarah pembentukan negara-negara Barat yang berangkat dari konsepsi Wesphalian tentang “negara-bangsa” (*nation-state*).<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya, maka domain keamanan dalam negeri suatu negara menjadi semakin kompleks karena menjangkau isu yang lebih luas seperti kemiskinan, konflik sosial, radikalisme, korupsi, narkoba, demagogi (ujaran kebencian), bencana alam, kerusakan antargolongan, kriminalitas, sampai dengan pemberontakan bersenjata. Dengan demikian upaya memelihara dan menjaga keamanan di sebuah negara tidak semata ditentukan oleh kemampuan militer saja, tapi juga dibutuhkan kesanggupan *element of national power*

<sup>30</sup> IPU dan DCAF, *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices* (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme dan Praktik), (Jenewa: IPU dan DCAF, 2003), hlm. 27.

<sup>31</sup> Peter Albrecht dan Karen Barnes, *Pembuatan Kebijakan Keamananan Nasional dan Gender*, (Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF, 2008), hlm. 1.

<sup>32</sup> Lihat David Hell, *Demokrasi dan Tatanan Global*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141.

<sup>33</sup> Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”, Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003), dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>, diunduh pada 23 Februari 2017.

yang lain. Salah satunya adalah kapasitas pemerintahan dan kesadaran dari *civil society*.

### **Integrasi dan Disintegrasi Suatu Bangsa**

Integrasi adalah saling ketergantungan yang lebih rapat dan erat antarbagian dalam organisme hidup atau antar anggota didalam masyarakat sehingga terjadi penyatuan hubungan yang dianggap harmonis. Kata integrasi berasal dari kata integer, yang berarti utuh, tidak retak, bulat, padu (*E Pluribus Unum*).

Faktor pendorong integrasi adalah tingginya tingkat kesadaran akan integrasi dan partisipasi, adanya pengawasan yang intensif dan efektif, terwujudnya asas keadilan sosial dan asas-asas solidaritas/*power sharing* secara efektif, adanya ancaman dan tekanan dari pihak luar, dan adanya simbol persatuan. Sebaliknya faktor penghambat integrasi adalah berkembangnya paham kedaerahan, berkembangnya paham stratifikasi sosial atau kelompok, berkembangnya anggapan bahwa agaman dan kepercayaan tertentu yang paling benar, berkembangnya anggapan bahwa kebudayaan tertentu yang paling tinggi dibandingkan dengan kebudayaan yang lain, dan sebagainya. Kata kuncinya adalah harmoni atau keseimbangan.

Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah<sup>34</sup>; hilangnya keutuhan

atau persatuan; perpecahan. Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah.<sup>35</sup> Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrate, “to lose unity or integrity by or as if by breaking into parts”. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Salah satu indikasi dari potensi ini adalah homogenitas etnik dan linguistik yang rendah.

Disintegrasi atau disorganisasi merupakan suatu keadaan yang tidak serasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan. Agar masyarakat dapat berfungsi sebagai organisasi harus ada keserasian antar bagian-bagiannya. Dalam teori-teori sosial dinyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi integrasi sosial adalah adanya homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok masyarakat, perpindahan fisik, dan efisiensi serta komunikasi.

Adapun disintegrasi atau disorganisasi adalah suatu keadaan dimana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari satu kesatuan atau suatu proses mudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Apabila suatu masyarakat berada dalam keadaan disintegrasi, maka harmoni dalam hubungan-hubungan sosial menjadi terganggu. Dengan demikian, individu-individu anggota masyarakat tidak lagi mengalami ketenteraman dan

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.

<sup>35</sup> Webster's New Encyclopedic Dictionary 1994.

ketertiban, tetapi menghadapi konflik atau pertentangan-pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi akan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang telah berubah.

Gejala awal disintegrasi atau disorganisasi sosial yaitu tidak ada persamaan pandangan (persepsi) antara anggotamasyarakatmengenaitujuan yang semula dijadikan pegangan oleh setiap anggota masyarakat. Selain itu, norma-norma masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pengendali sosial untuk mencapai tujuan masyarakat sehingga terjadi pertentangan antara norma yang ada didalam masyarakat. Selain pihak sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar norma tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal ini mengakibatkan terjadinya proses sosial yang bersifat disosiatif seperti persaingan, pertentangan, atau kontroversi (menghasut, memfitnah, mengganggu proses, dan melakukan perang urat saraf) atau demagogi.

Berdasarkan uraian teoretis di atas maka penulis menentukan kerangka

pemikiran sebagai berikut:

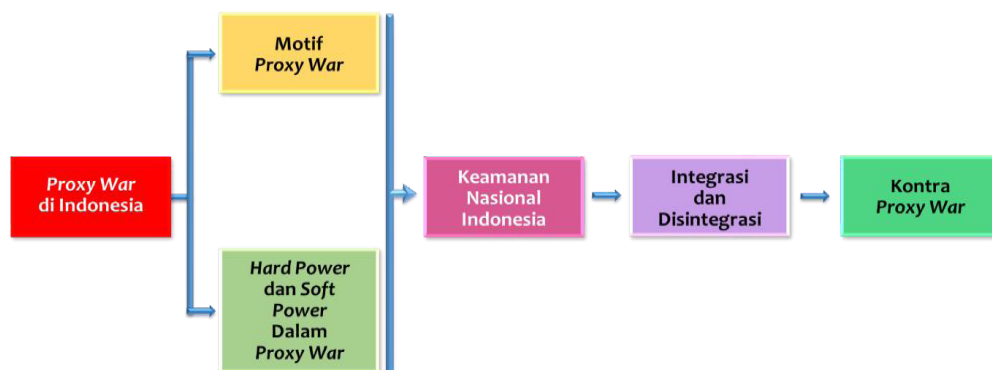
## **Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia**

### **Memahami Motif Kekuatan Besar di Indonesia**

Kita menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang plural dan melimpah yang telah diberikan Tuhan (*Opus Dei*) kepada Indonesia. Hal ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kita sebagai warga negara dari Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang kita miliki untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai perbedaan itu dapat pula menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Sehingga secara historis pendahulu bangsa menyatakan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu (*E Pluribus Unum*).

Motif *proxy war* yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam beberapa kasus adalah kekuasaan atas politik dan

**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis, 2017



ekonomi baik menggunakan *hard power* dan *soft power*. Perang *proxy* dilakukan dengan menggunakan kelompok-kelompok lokal suatu negara yang berasal dari aktor negara maupun non negara. Penguasaan politik maupun militer tersebut tidak terlepas dari kepentingan negara-negara besar (*major powers*) baik dalam kerangka pertarungan kekuasaan (*struggle for power*) atau pertarungan pengaruh (*the power of influence*).<sup>36</sup>

Kesejarahannya kita sebagai sebuah bangsa pernah mengalami kondisi terpecah belah karena belum tumbuhnya rasa nasionalisme. Berbagai kerajaan dengan latar agama yang berbeda seperti kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Bugis, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Kutai, dan sebagainya berhasil diadu domba untuk penguasaan ekonomi (rempah-rempah yang saat itu menjadi primadona di Eropa). Kondisi sekarang pun tidak jauh berbeda dimana jumlah suku terdida dari 300 lebih dari berbagai bahasa dan agama memiliki kerawanan untuk *divide and rule* oleh kekuatan asing tidak hanya untuk menguasai kekayaan alam

<sup>36</sup> Andrew Mumford, *Proxy Warfare. War and Conflict in the Modern World*, (Cambridge U.K: Polity Press, 2013); Innes, *op.cit*; Shane Harris, *@ War: The Rise of the Military-Internet Complex*, (Boston, New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2012), E. L. Speed, *Proxy War, Volume One: Phantom War Trilogy*, (Triburon, California, U.S: Metaterra Publications, 2012), Stillman, *op.cit*; Peter Hopkirk, *The Great Game: On Secret Service in High Asia (Reprint Edition)*, (New York: Oxford University Press, 2006); Bean, Richard et al, *The Great Game: Afghanistan (Oberon Modern Plays)*, (First Edition. U.K: Oberon Books Limited, 2010); Ariel I. Ahrum, *Proxy Warriors: The Rise and Fall of State-Sponsored Militias*, (Stanford, California: Stanford University Press, 2011).

namun dapat dijadikan segmen-segmen pasar (*market*) bagi produk-produk asing.

Pendekatan yang dilakukan pun beragam mulai dari interaksi dagang yang saling menguntungkan, kemudian beralih menjadi menguntungkan sebagian kelompok sehingga menimbulkan perpecahan internal. Oleh karena itu sebagai upaya membangun kesadaran adalah kembali menyadari *tabula rasa* sebagai warga negara Indonesia dan *pro bono* untuk kepentingan publik.

## Menjaga Keamanan Nasional Indonesia

Kebijakan mengenai Keamanan Nasional meliputi UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan “*Regelling op de Staat Van Oorlog en Beleg*” dan penetapan “Keadaan Bahaya”, PerPu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, PP Nomor 16 tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. Sedangkan Undang-Undang Teknis yang lahir Pasca Reformasi yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan lain-lain. Namun bila disadari kebijakan dan perundang-undangan lainnya pada esensinya adalah menjaga keamanan nasional Indonesia yang dibungkus dengan kalimat dan orientasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh elit pemerintahan masih saling tumpang tindih dan berjalan secara terpisah (sektoral) sesuai dengan kepentingan masing-masing institusi. Keadaan ini menyebabkan efektivitas penanganan berbagai masalah atau ancaman keamanan nasional sangat lemah.<sup>37</sup> Dengan demikian peluang disintegrasi bangsa yang menghantui negeri ini bisa muncul dari berbagai sumber baik pemerintah maupun non pemerintah. Kebhinekaan yang dianggap sebagai kekayaan bangsa, baik dari segi etnis yang berjumlah puluhan, budaya, bahasa, adat istiadat, agama serta berbagai kepercayaan yang ada, ternyata mempunyai sisi yang rawan berupa potensi perpecahan yang implikasinya bisa sangat luas dan mendalam. Sehingga tepat yang dikatakan oleh Sun Tzu “kekuatan adalah kelemahan.”

Disharmoni pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya merupakan peluang terjadinya disintegrasi di tengah keragaman demografi Indonesia. Kondisi

yang tidak seimbang atau dengan kata lain labil dapat berpeluang untuk meningkat menjadi krisis kemudian menghasilkan penetangan sebagai wujud protes atas ketidakadilan yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat sehingga dapat dengan mudah dijadikan alat perpanjangan tangan (*proxy*) negara-negara besar (*major powers*) untuk *divide and rule* Indonesia. Sebagaimana yang terjadi dengan politik *divide et impera* pada masa Belanda (VOC) tahun 1596-1942.

Kecenderungan negara-negara besar (*major powers*) untuk menggunakan pendekatan *soft power* perlu dicermati dalam konteks Indonesia. Keamanan nasional Indonesia memang perlu dipertahankan dalam menghadapi *soft power* tersebut. Sebagaimana Cooper menyatakan setidaknya terdapat tiga titik lemah *soft power*, maka keamanan nasional Indonesia perlu melakukan penguatan budaya karena pengaruh budaya dan politik tidak sama. Mengenai budaya ini sudah dijelaskan dalam UUD 1945 tentang budaya Indonesia sehingga perlu dilakukan penguatan budaya lokal sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Penggunaan strategi *soft power* tergantung pada keadaan tertentu yang tidak bisa selalu dipengaruhi oleh Negara. Dengan banyaknya aktor yang dijadikan sebagai pihak ketiga maka akan sulit suatu negara untuk meaksakan kehendaknya secara langsung. Hal ini merupakan strategi yang tepat bila dilakukan Indonesia dengan memberikan

---

<sup>37</sup> Marsma TNI Bambang Eko S, S.H., M.H., “Urgensi UU Kamnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Majalah Wira*, Jakarta, Kemhan RI Edisi Khusus, 2015, hlm. 6-13.

pandangan-pandangan dilingkungan LSM dan Organisasi Kepemudaan selain dilakukan di kalangan lembaga pendidikan.

Manfaat yang sebenarnya dari pengaturan agenda sebagai hasil positif dari praktek-praktek yang telah berlangsung lama dengan menggunakan *soft power* oleh negara-negara besar belum tentu menjawab kebutuhan lokal. Sebagai konsekuensinya menurut hemat penulis membutuhkan waktu yang relatif panjang, dan akan semakin panjang bila secara nasional suatu negara semakin mandiri dalam mengadopsi suatu kebijakan internasional sesuai dengan kulturenya sendiri.

### **Kobaran Semangat Integrasi: *Tabula rasa, pro bono publico*, dan *Opus Dei* Indonesia sebagai Upaya Kontra Proxy War**

*Tabula rasa* memiliki pengertian “*something existing in its original pristine state*”<sup>38</sup> atau “sesuatu yang ada di negara murni aslinya.” John Locke (1697) “*the human mind at birth is a complete, but receptive, blank slate, upon which experience imprints knowledge*”. Locke menyatakan bahwa manusia itu memiliki fitrahnya yang hampa kemudian dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian pula Ralph Waldo Emerson menyatakan “*...man is a bundle of relations, a knot of roots, whose flower and fruitage is the world...*”. Kita hendaknya kembali kepada kesadaran sebagai manusia Indonesia

yang memiliki nilai-nilai tersendiri yang telah dibulatkan oleh pendahulu dalam falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Perjalanan kemerdekaan yang sudah memasuki usia 70 tahun ini, masih menyisakan beragam persoalan dalam kemajemukan yang intensitasnya kian membesar. Konflik yang diharapkan bisa selesai dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum sepenuhnya terwujud. Kekerasan menjadi pilihan sebagian masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan. Konflik horizontal yang dipicu persoalan politik, ekonomi, agama, arogansi ormas, bahkan pertandingan sepakbola seringkali diselesaikan dengan kekerasan. Bila dilihat pada konflik dan perang sebagaimana diuraikan pada tabel 1 di atas maka yang paling penting dipenruhi adalah kalangan elit. Kalangan elit yang merupakan representasi negara maupun aktor non negara. Keadilan secara ekonomi dan politik dalam pengertian kekuasaan merupakan penyebab dari munculnya gerakan penentangan lokal. Ketika muncul kekuatan rakyat secara alamiah untuk menentang atas ketidakadilan maka akan terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial belum pernah terjadi di Indonesia karena kulturenya yang beraneka ragam dengan demikian banyak pandangan sehingga sulit dipersatukan sebagai kekuatan sosial dan politik. Hal ini merupakan kelemahan sekaligus kekuatan karena akan sulit untuk dipengaruhi oleh pandangan luar dalam waktu singkat.

<sup>38</sup> Merriam Webster Online Dictionary, 2017.

Tentu kita tidak dapat melupakan bagaimana upaya “balkanisasi” yang dilakukan atas Indonesia dengan peristiwa Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit (konflik antara etnis Dayak/Melayu dengan Madura), kerusuhan Ambon dan Poso (konflik antar agama) dan DOM Aceh yang berujung keinginan memisahkan diri dari NKRI, dan sebagainya. Kondisi ini tentu memprihatinkan bagi sebuah bangsa yang lahir dari penyatuan kemajemukan. Sehingga menjalankan suatu negara membutuhkan keseimbangan setiap komponennya/Sub sistem negara sebagaimana dinyatakan Plato:

*“...Are all our actions alike performed by the one predominant faculty, or are there three faculties operating severally in our different actions? Do we learn with one internal faculty, and become angry with another, and with a third feel desire for all the pleasures connected with eating and drinking, and the propagation of the species; or upon every impulse to action, do we perform these several actions with the whole soul?”<sup>39</sup>.*

Menghindari ego sektoral adalah sebuah kata kunci dalam memelihara integrasi. Kembali kepada fitrah Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya adi luhung dalam menjaga kemajemukannya Pancasila sebagai landasan Idiil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, dan Ketetapan MPR Nomor : V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Menghadapi motif dan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara besar (*major powers*) maka diperlukan tindakan (*actions*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam politik domestik yang akan direfleksikan dalam hubungan luar negerinya. Nasionalisme merupakan kata kunci untuk menanamkan kontra *proxy*. Nasionalisme ini tidak hanya dikaitkan dengan kekuatan militer (*hard power*) namun lebih kepada nilai-nilai yang dapat memadukan keragaman dalam satu persatuan (*E Pluribus Unum*).

Ketika nasionalisme ini menguat maka integrasi akan menguat pula. Pada akhirnya tujuan politik penggunaan *hard power* dan *soft power* sebagaimana diurikan sebelumnya adalah terjadinya disintegrasi atas suatu negara yang dilakukan oleh negara-negara besar melalui pihak ketiga (yang berasal dari dalam negara sasaran). Jika dahulu Belanda menggunakan politik *divide et Impera* (pecah belah kerajaan-kerajaan) dengan motif *gold, gospel*, dan *glory*-nya yang pada akhirnya menguasai kekayaan alam nusantara yang pada saat itu merupakan primadona ekonomi internasional. Sekarang ini menurut hemat penulis selain penguasaan kekayaan alam juga persaingan negara-negara besar dalam merebut pasar. Negara-negara besar menggunakan istilah *divide and rule* (pecah belah kemudian diatur).

Keamanan nasional dewasa ini bukan hanya berdimensi militer namun memiliki dimensi-dimensi lainnya terutama ekonomi. Persepsi tentang keamanan nasional yang hanya

---

<sup>39</sup> Plato-The Republic: Book 4.

berorientasi kepada kekuatan militer selayaknya juga diseimbangkan dengan ancaman yang berdimensi lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan sudah menyenth isu agama. Hal ini sangat membahayakan bagi Indonesia yang memang Opus Dei diciptakan Tuhan dengan kemajemukan yang kompleks. Kesadaran masing-masing masyarakat untuk tidak mudah dipengaruhi memang dituntut untuk menghadapi ancaman yang berdimensi nirmiliter.

Dilain pihak kebijakan pemerintah selayaknya dapat mengantisipasi terjadinya *determined to sow terror* yang dilahirkan oleh *proxy war* (teror yang ditaburkan melalui *proxy war*). Kebijakan keamanan nasional bukan hanya domain pemerintah atau elit pemerintahan. Keamanan nasional merupakan domain seluruh elit termasuk di luar pemerintahan (*non governmental*). Kebijakan keamanan nasional perlu diberikan kepada elit di luar pemerintahan sehingga seimbang antara peran elit pemerintahan dan elit non pemerintahan (LSM, Tokoh masyarakat, dan sebagainya). Namun sebagai kata kunci adalah negara ini milik kita bersama lantas siapa lagi yang akan membela dan mempertahankannya selain warga negaranya.

Selain itu salah satu faktor integrasi sosial di Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan sebagai simbol kebanggaan warga negara Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia akan membangkitkan kembali semangat

persatuan dan kesatuan sehingga diharapkan tidak ada satu suku bangsa pun yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI sebagaimana telah disepakati oleh pendahulu bangsa melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Demikian juga Pancasila sebagai kepribadian dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia. Jiwa dan semangat gotong royong yang kuat serta rasa solidaritas dan toleransi keagamaan yang tinggi merupakan nilai-nilai yang terandung dalam Pancasila selain nilai-nilai lainnya yang demikian banyak untuk mewujudkan harmoni. Faktor kesejarahan yaitu rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita cukup lama oleh seluruh suku bangsa di Indonesia hendaknya tetap diingat betapa merdeka itu lebih baik dibandingkan tercerai berai dan terjajah.

## Kesimpulan

Motif yang dilakukan oleh negara-negara besar tidak jauh berbeda dengan kondisi aktual. Dewasa ini penggunaan *soft power* lebih besar dibandingkan dengan penggunaan *hard power* dan pada skala tertentu dilakukan kombinasinya oleh negara-negara besar. Perjalanan sejarah Indonesia pernah mengalami masa-masa dimana kalangan elit saling berlomba untuk memperoleh kekuasaan sebagai perpanjangan tangan negara-negara besar sehingga justru hasilnya adalah tercerai-berainya persatuan Indonesia.

Untuk menjaga keutuhan Indonesia dengan kemajemukannya, upaya atas

integrasi nasional harus menjadi salah satu agenda utama dalam konteks kepemimpinan nasional dengan mengedepankan *pro bono publico*. *Pro bono publico* menurut Webster Dictionary “being, involving, or doing professional and especially legal work donated especially for the public good.” Dalam pengertian yang lebih Indonesia adalah tanpa pamrih. Tanpa pamrih dalam mengelola kemajemukan, yakni kemampuan untuk bisa memadukan semua golongan, ras, dan agama, serta dapat menyatukan perbedaan dalam keharmonisan. Hal ini terutama di kalangan elit yang berdasarkan aspek kesejarahan Indonesia justru menjadi aktor yang digunakan oleh negara besar baik elit yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara.

*Opus Dei* memiliki pengertian “God’s work”. Ciptaan Tuhan memiliki pengertian kita mengakui adanya Tuhan dan sekaligus penciptaannya. Indonesia diciptakan dengan kemajemukan. Dengan kemajemukan tersebut maka sifat-sifat Bhinneka Tunggal Ika. Yang disertai kecintaan terhadap bangsa, rela berkorban, tenggang rasa (rasa senasib dan sepenanggungan, tepo seliro), berjiwa patriot (*pro bono*), dan sebagainya perlu dipelihara dalam menjaga keseimbangan atau harmoni sehingga kita dapat mencapai kemenangan (*Victoria Concordia Crescit*).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahram, Ariel I. 2011. *Proxy Warriors: The Rise and Fall of State-Sponsored Militias*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Albrecht, Peter dan Barnes, Karen. 2008. *Pembuatan Kebijakan Keamananan Nasional dan Gender*. Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF.
- Armitage, R. L. & Nye, J. S., 2007. *CSIS Commission on Smart Power: A smarter, more secure America*. Washington: CSIS Press.
- Bean, Richard et al. 2010. *The Great Game: Afghanistan (Oberon Modern Plays). First Edition*. U.K: Oberon Books Limited.
- Cooper, R. 2004. *Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy*. Dalam D. Held & M. Koenig-Archibugi (Eds). *American Power in the 21st Century*. Cambridge: Polity Press.
- Dunne, Tim & Brian C. Schmidt. 2001. “Realism”, dalam John Baylis & Steve Smith (Eds), *The Globalization of World Politics*, 2<sup>nd</sup> edition. Oxford: Oxford University Press.
- De Mesquita, Bruce Bueno & Alastair Smith. 2012. *Domestic Explanations of International Relations*, New York: Department of Politics New York University.
- Harris, Shane. 2012. *@War: The Rise of the Military-Internet Complex*. Boston, New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
- Heywood, A. 2011. *Global Politics*. Basingstoke: Palgrave Foundation.
- Hopkirk, Peter. 2006. *The Great Game: On Secret Service in High Asia (Reprint Edition)*. New York: Oxford University Press.
- Hell, David. 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Innes, Michael A. 2012. *Making Sense of Proxy*



*Wars: States, Surrogates & the Use of Force*. Dulles Virginia: Potomac Books

IPU dan DCAF. 2003. *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme dan Praktik)*. Jenewa: IPU dan DCAF.

Mumford, Andrew. 2013. *Proxy Warfare. War and Conflict in the Modern World*. Cambridge U.K: Polity Press.

Nye, Joseph S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.

——, 2009. *Understanding International Conflicts*. 7<sup>th</sup> ed. New York: Pearson.

Stillman, Mike. 2008. *Proxy Wars: The Business of War*. Bloomington, Indiana: Trafford on Demand Pub.

Speed, E. L. 2012. *Proxy War. Volume One: Phantom War Trilogy*. Triburon, California, U.S: Metaterra Publications.

Simpson, Dick, James Nowlan, Elizabeth O'Shaughnessy. 2010. *The Struggle for Power and Influence in Cities and States 1st Edition*. London: Pearson.

Sekjen Wantannas. 2010. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

## Jurnal

Gallarotti, G. 2011. "Soft Power: what it is, it's importance, and the conditions for its effective use". *Journal of Political Power*. Vol. 4. No. 1.

Heng, Y.-K. 2010. "Mirror, mirror on the wall, who is the softest of them all? Evaluating Japanese and Chinese strategies in the 'soft' power competitions era". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 10.

Hermann, Margaret G. 1980. "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders", *International Studies Quarterly*. Vol. 24. No. 1.

Nossel, S. 2004. "Smart Power". *Foreign Affairs*. Vol. 83. No.2.

Nye, Joseph S. 1990. "Soft Power". *Foreign Policy*. Issue 80.

——, Joseph S. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power". *The ANNALS of the American Academy for Political and Social Science*. Issue 616.

Smith-Windsor, B. A. 2000. "Hard Power, Soft Power Reconsidered". *Canadian Military Journal*. Vol. 1. No. 3.

Wilson, E. J. 2008. "Hard Power, Soft Power, Smart Power". *ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences*. Issue 616.

## Majalah

S, Bambang Eko. 2015. "Urgensi UU Kamnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Majalah Wira*. Jakarta: Kemhan RI Edisi Khusus.

## Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008.

Merriam Webster Online Dictionary. 2017.

Webster's New Encyclopedic Dictionary. 1994.

## Website

Anggoro, Kurnanto "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum", Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003), dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>, diunduh pada 23 Februari 2017.

English Oxford Living Dictionaries. *Proxy war*, [https://en.oxforddictionaries.com/definition/proxy\\_war](https://en.oxforddictionaries.com/definition/proxy_war), diakses pada 12 Februari 2014.

Elliot, 10 Greatest Proxy Wars Ever, <http://eskify.com/10-greatest-proxy-wars-ever/> diakses pada 12 Februari 2014.

Proxy War Reference, <https://www.reference.com/education/proxy-war-b728308de84469fd>, diakses pada 12 Februari 2014.

List of Proxy Wars, [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_proxy\\_wars](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_proxy_wars), diakses pada 12 Februari 2014.